Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)
Volume 8, Nomor 2, Maret – April 2025
e-ISSN: 2598-4934
p-ISSN: 2621-119X
DOI: https://doi.org/10.31539/kaganga.v8i2.14119

PEMETAAN ASET DESA OLEH BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) UNTUK PEMBANGUNAN UMKM PARIWISATA

Fauzi Adnan[1], LV Ratna Devi Sukantalawati[2], Yuyun Sunesti[3]
Universitas Sebelas Maret (UNS)[1,2,3]
fauziadnanrpl@gmail.com[1]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemetaan aset desa oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendukung pembangunan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor pariwisata, khususnya di Desa Geger. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses, pelibatan aktor, serta kendala dalam pemetaan aset desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemetaan dilakukan secara partisipatif, melibatkan pengurus BUMDes, pemerintah desa, RT, RW, pelaku UMKM, dan penggiat desa. Pemetaan diawali dengan penentuan tema musyawarah sebagai dasar identifikasi aset, yang kemudian divisualisasikan dalam bentuk representasi spasial wilayah desa. Namun, kendala utama yang dihadapi adalah kurang optimalnya pemanfaatan aset, terutama sumber daya alam yang tersedia. Sebagian besar aset seperti embung, lahan kosong, lapangan, dan sawah belum dimanfaatkan secara efektif untuk kegiatan pariwisata. Dari enam embung yang ada, hanya satu yang telah dikelola untuk tujuan wisata, sedangkan sisanya belum dimanfaatkan. Hal ini mencerminkan masih rendahnya pemahaman dan kapasitas pengelolaan aset desa oleh para pemangku kepentingan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas dan kolaborasi lintas sektor guna mengoptimalkan pemanfaatan aset desa untuk mendukung pengembangan UMKM pariwisata secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pemetaan Aset Desa, Pengembangan, UMKM Pariwisata.

ABSTRACT

This study aims to describe the mapping of village assets by Village-Owned Enterprises (BUMDes) in supporting the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the tourism sector, especially in Geger Village. This study uses a qualitative approach with a case study method used in this study to gain an in-depth understanding of the process, actor involvement, and obstacles in mapping village assets. The results of the study show that the mapping process was carried out in a participatory manner, involving BUMDes administrators, village government, RT, RW, MSME actors, and village activists. Mapping begins with determining the theme of the discussion as the basis for identifying assets, which are then visualized in the form of a spatial representation of the village area. However, the main obstacle faced is the less than optimal utilization of assets, especially the available natural resources. Most assets such as reservoirs, empty land, fields, and rice fields have not been utilized effectively for tourism activities.

Of the six existing reservoirs, only one has been managed for tourism purposes, while the rest have not been utilized. This reflects the still low understanding and capacity of village asset management by stakeholders. This study recommends increasing capacity and cross-sector collaboration to optimize the use of village assets to support the development of sustainable tourism MSMEs.

Keywords: *Development, Tourism MSMEs, Village Asset Mapping, Village-Owned Enterprises (BUMDes).*

PENDAHULUAN

Pemetaan aset desa merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, mencatat, dan memetakan berbagai potensi yang dimiliki desa, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Aset desa mencakup sumber daya alam (seperti tanah, air, dan hasil bumi), sumber daya manusia, sosial budaya, maupun aset kelembagaan. Pemetaan ini sangat penting sebagai dasar perencanaan pembangunan desa yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan (Yustika, 2012).

Menurut (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, 2024) pemetaan aset merupakan langkah awal dalam tata kelola desa yang baik, karena memungkinkan pemerintah desa mengetahui kekuatan dan peluang ekonomi lokal yang bisa dikembangkan. Pemetaan ini juga digunakan untuk menciptakan basis data desa yang dapat mendukung perumusan kebijakan, perencanaan program, hingga pengambilan keputusan dalam pembangunan berbasis potensi lokal (Srirejeki dkk., 2020).

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu bentuk implementasi dari semangat otonomi desa dalam rangka mengelola potensi ekonomi secara mandiri. Hal ini diatur dalam (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, 2021) bahwa BUMDes didefinisikan sebagai usaha milik desa yang dibentuk oleh pemerintah desa dengan kepemilikan modal dan pengelolaan dilakukan secara bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat. Lebih lanjut tujuan utama pembentukan BUMDes adalah untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa, serta menciptakan peluang kerja dan memperkuat kesejahteraan masyarakat (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, 2021).

BUMDes merupakan lembaga ekonomi desa yang dibentuk dan dimiliki oleh desa, serta dikelola secara bersama untuk mengelola potensi ekonomi dan pelayanan umum guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes sebagai entitas kelembagaan diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal melalui pengelolaan sumber daya yang dimiliki desa secara efisien dan berkelanjutan (Sumodiningrat, 2018).

Menurut (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, 2021), lembaga ini dibentuk berdasarkan musyawarah desa dan berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Secara operasional, BUMDes dapat bergerak

di berbagai bidang usaha, termasuk pengelolaan aset, penyediaan jasa, perdagangan, dan pengembangan sektor pariwisata (Saragih, 2019). BUMDes juga menjadi alat transformasi sosial dan ekonomi karena memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat lokal (Utomo, 2021).

Namun, dalam praktiknya, pengelolaan BUMDes belum sepenuhnya berhasil mengoptimalkan aset desa secara efektif. Seperti yang terjadi di Desa Geger, meskipun desa ini memiliki sumber daya alam yang potensial, seperti 1012 hektar lahan persawahan dan enam embung yang tersebar di empat dusun, pemanfaatan aset tersebut masih belum maksimal. Usaha BUMDes dalam bidang pertanian belum menunjukkan hasil yang signifikan, dan potensi embung sebagai destinasi wisata belum dikelola secara optimal.

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) sektor pariwisata merupakan aktor utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di wilayah destinasi wisata. UMKM pariwisata mencakup berbagai jenis usaha seperti kuliner, kerajinan tangan, *homestay*, jasa transportasi, dan pemandu wisata. Peran UMKM dalam pariwisata tidak hanya sebagai penyedia layanan, tetapi juga pelestari budaya dan penggerak sosial ekonomi masyarakat (Tambunan, 2021).

Dalam konteks pembangunan berbasis komunitas, UMKM pariwisata harus dikembangkan secara terintegrasi dengan dukungan infrastruktur, pelatihan SDM, dan akses permodalan. Menurut (Sarudin, 2023) pemberdayaan UMKM pariwisata dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat daya tarik destinasi lokal. Pembangunan UMKM juga memerlukan perencanaan yang berbasis potensi lokal dan dukungan dari kelembagaan seperti BUMDes agar lebih terarah dan berkelanjutan (Ermawati, 2021).

Penelitian sebelumnya oleh (Pradani, 2020) menunjukkan bahwa keberhasilan BUMDes sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam memetakan aset desa dan mengembangkan unit usaha yang sesuai dengan potensi lokal. Sementara itu, studi oleh (Iskandar dkk., 2021) menemukan bahwa pemanfaatan aset desa untuk pariwisata mampu meningkatkan pendapatan desa jika dilakukan secara terencana dan melibatkan masyarakat. Di sisi lain, penelitian oleh (Azhari dkk., 2023) menyoroti bahwa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam pengembangan BUMDes yang berorientasi pada sektor pariwisata.

Gap penelitian terletak pada kurangnya kajian yang secara spesifik membahas proses pemetaan aset desa oleh BUMDes dalam konteks pengembangan UMKM pariwisata. Sebagian besar studi sebelumnya hanya berfokus pada aspek manajerial atau dampak ekonomi BUMDes secara umum, tanpa mengeksplorasi bagaimana strategi pemetaan aset dilakukan secara praktis di lapangan. Novelty dari penelitian ini adalah pada upaya mendeskripsikan proses pemetaan aset oleh BUMDes secara partisipatif dan kontekstual di Desa Geger untuk mendukung pengembangan UMKM berbasis pariwisata. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi pengelolaan aset desa secara lebih efektif, berbasis potensi lokal dan

keterlibatan komunitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggali secara mendalam proses pemetaan aset desa oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendukung pembangunan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor pariwisata. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan secara komprehensif realitas sosial dan dinamika yang terjadi di lapangan, terutama dalam konteks lokal yang sarat dengan nilai-nilai partisipatif dan kultural. Metode studi kasus digunakan agar peneliti dapat memahami secara spesifik karakteristik, potensi, serta tantangan yang dihadapi oleh BUMDes di Desa Geger dalam mengelola dan memanfaatkan aset desa untuk pengembangan UMKM pariwisata. Penelitian ini bersifat deskriptif, karena bertujuan untuk memberikan gambaran faktual dan sistematis mengenai situasi yang diteliti berdasarkan data empirik dari informan kunci.

Subjek dalam penelitian ini meliputi pengelola BUMDes, aparatur pemerintah desa, dan pelaku UMKM lokal yang beroperasi di sektor pariwisata. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, dengan mempertimbangkan pengetahuan dan keterlibatan langsung mereka dalam proses pemetaan dan pengelolaan aset desa. Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Geger, yang secara administratif berada dalam wilayah dengan karakteristik pedesaan agraris dan memiliki potensi sumber daya alam seperti embung, lahan pertanian, dan area terbuka yang berpotensi dikembangkan sebagai destinasi wisata. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada realitas bahwa BUMDes di Desa Geger belum menunjukkan efektivitas optimal dalam mengelola aset desa, khususnya dalam sektor pariwisata, sehingga diperlukan kajian yang mendalam untuk merumuskan strategi pengembangan UMKM pariwisata yang relevan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan informan kunci untuk memperoleh data mengenai proses, strategi, serta tantangan dalam pemetaan dan pemanfaatan aset desa. Observasi dilakukan untuk mengamati kondisi fisik aset desa dan aktivitas yang berlangsung di lapangan. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa profil desa, laporan kegiatan BUMDes, dan dokumen perencanaan desa yang relevan. Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, teknik, dan waktu, guna menguji konsistensi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data dilakukan dengan menyortir dan merangkum data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk fokus pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi, matriks, atau peta visual untuk memudahkan peneliti dalam

memahami hubungan antar variabel dan dinamika yang terjadi. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, di mana peneliti menginterpretasi data untuk memperoleh temuan yang bermakna serta merumuskan rekomendasi strategis dalam pengembangan UMKM pariwisata berbasis pemetaan aset desa.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemetaan aset desa oleh BUMDes Geger dalam pengembangan UMKM pariwisata telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan strategis, namun masih menghadapi kendala partisipatif dan optimalisasi aset. Salah satu kegiatan yang menjadi fokus utama adalah musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BUMDes sebagai forum awal untuk menggali potensi dan perencanaan pembangunan berbasis aset desa. Dalam pelaksanaannya, kegiatan musyawarah ini dinilai efektif oleh sebagian peserta yang merasa dilibatkan secara langsung, terutama dari kalangan pelaku UMKM, pengurus BUMDes, dan perangkat desa. Namun demikian, beberapa warga menyatakan ketidakpuasan karena tidak pernah diundang atau merasa tidak memiliki peran dalam forum tersebut. Hal ini mencerminkan masih adanya kesenjangan partisipasi masyarakat yang berdampak pada legitimasi hasil musyawarah dan kurangnya rasa kepemilikan terhadap program yang dijalankan.

Dari sisi pemetaan sumber daya manusia, BUMDes telah berupaya menjangkau berbagai elemen masyarakat melalui forum yang melibatkan pengurus BUMDes, pemerintah desa, BPD, tokoh pemuda, pelaku UMKM, dan perwakilan RT/RW. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi individu yang memiliki keterampilan, kreativitas, serta komitmen tinggi dalam mendukung pengembangan UMKM berbasis pariwisata. Hasil dari pemetaan ini menunjukkan bahwa terdapat sejumlah individu yang dinilai memiliki potensi dalam manajemen usaha, pemasaran digital, dan pengelolaan produk lokal. Namun, belum semua potensi ini dikelola secara maksimal karena keterbatasan pelatihan dan fasilitas pendukung.

Pemetaan sumber daya alam dilakukan dengan mencatat aset fisik seperti lahan kosong, sawah, embung, dan lapangan terbuka yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi area wisata edukatif dan rekreasi. Proses ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola sumber daya lokalnya. Dalam hal ini, BUMDes telah mengidentifikasi bahwa embung dan area persawahan dapat dikembangkan menjadi destinasi agrowisata yang melibatkan masyarakat setempat. Namun, proses pengembangan masih terhambat oleh keterbatasan anggaran dan belum adanya kerja sama yang kuat dengan mitra eksternal.

Selain itu, pemetaan aspek ekonomi desa juga dilakukan untuk menilai kapasitas dan keberlanjutan UMKM dalam ekosistem pariwisata. Beberapa aspek yang dipetakan meliputi akses permodalan, sarana prasarana, jaringan kemitraan, serta ketersediaan pasar. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian pelaku UMKM masih bergantung pada modal pribadi dengan keterbatasan

jaringan pemasaran. Kerja sama antara BUMDes dan lembaga keuangan belum berjalan optimal, sehingga menimbulkan hambatan dalam pengembangan skala usaha.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun proses pemetaan aset oleh BUMDes di Desa Geger telah berjalan sesuai tahapan ideal, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Hal ini sejalan dengan teori kelembagaan yang menekankan pentingnya hubungan antara organisasi dengan lingkungan eksternal dan bagaimana norma, keyakinan, serta ekspektasi masyarakat memengaruhi cara kerja organisasi. Dalam konteks ini, BUMDes sebagai lembaga lokal perlu membangun komitmen kuat untuk melibatkan masyarakat secara lebih inklusif serta menjalin kolaborasi lintas sektor guna mengoptimalkan pengelolaan aset dan pengembangan UMKM pariwisata secara berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemetaan aset desa oleh BUMDes di Desa Geger dalam konteks pengembangan UMKM pariwisata telah dilakukan melalui tahapan yang cukup sistematis, namun belum sepenuhnya optimal dalam implementasinya. Dalam perspektif teori kelembagaan yang dikemukakan oleh (Scott, 2010) dapat dilihat bahwa proses dan dinamika organisasi desa tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga sangat ditentukan oleh struktur sosial, norma, dan harapan eksternal masyarakat. Ketika musyawarah desa tidak melibatkan secara luas masyarakat yang terdampak, maka legitimasi kelembagaan menjadi lemah dan berpotensi menimbulkan ketidakterlibatan dalam implementasi program.

Fenomena ini sejalan dengan temuan Hadawiya dkk., (2021) yang mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan desa sangat dipengaruhi oleh seberapa jauh masyarakat dilibatkan dalam forum formal. Ketika musyawarah hanya dihadiri oleh elit desa atau pelaku langsung, maka terjadi ketimpangan informasi dan rasa kepemilikan terhadap program pun berkurang. Hal ini menjadi tantangan kelembagaan yang perlu dibenahi melalui transparansi dan inklusivitas.

Lebih lanjut, upaya pemetaan sumber daya manusia dan sumber daya alam telah menunjukkan arah kebijakan yang cukup baik, yaitu melibatkan aktor-aktor strategis seperti tokoh pemuda, penggiat desa, dan pelaku UMKM. Namun, berdasarkan temuan (Wahyuningsih, 2021) keberhasilan pengembangan UMKM tidak hanya ditentukan oleh identifikasi sumber daya manusia, tetapi juga oleh intervensi pelatihan, inkubasi usaha, dan pembentukan jejaring yang berkelanjutan. Dalam konteks Desa Geger, masih minimnya pelatihan dan lemahnya kerja sama dengan mitra eksternal menjadi hambatan dalam optimalisasi potensi SDM.

Dari sisi kelembagaan ekonomi, BUMDes diharapkan berfungsi sebagai penggerak ekonomi lokal. Namun, sebagaimana dijelaskan oleh (Huda, 2020) kelembagaan BUMDes sering kali terhambat oleh keterbatasan kapasitas manajerial, ketergantungan pada dana desa, serta lemahnya inovasi usaha. Hal serupa juga terlihat di Desa Geger, di mana aset desa seperti tanah

kosong dan embung belum dimanfaatkan secara produktif karena keterbatasan dalam desain model bisnis dan permodalan.

Pentingnya dukungan struktural dan kemitraan strategis juga ditegaskan dalam studi (Ash-Shiddiqy, 2022) yang menyatakan bahwa keberhasilan BUMDes dalam membangun UMKM pariwisata sangat ditentukan oleh kemampuan mereka menjalin kolaborasi dengan sektor swasta, akademisi, dan pemerintah daerah. Dalam kasus Desa Geger, belum terjalinnya jejaring luas menjadi faktor penghambat utama bagi ekspansi usaha yang berbasis pada potensi lokal.

Dengan demikian, berdasarkan teori kelembagaan dan studi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penguatan struktur internal organisasi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pembentukan kemitraan strategis merupakan langkah penting untuk menjadikan pemetaan aset desa lebih berdampak terhadap pengembangan UMKM pariwisata yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pemetaan aset desa yang dilakukan oleh BUMDes dalam upaya pengembangan UMKM pariwisata di Desa Geger telah berjalan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti pengurus BUMDes, pemerintah desa, RT, RW, pelaku UMKM, dan penggiat desa. Proses ini diawali dengan penentuan tema musyawarah sebagai bentuk perencanaan awal kegiatan pemetaan.

Pemetaan yang dilakukan mencakup aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan potensi ekonomi desa, dengan tujuan untuk mengidentifikasi aset yang dapat diberdayakan guna mendukung sektor pariwisata berbasis UMKM. Namun, meskipun proses pemetaan telah dilaksanakan dengan cukup baik, hasil implementasinya belum menunjukkan pemanfaatan yang optimal terhadap aset desa yang telah teridentifikasi.

Kendala utama terletak pada rendahnya pemanfaatan aset yang tersedia, seperti embung, lahan kosong, lapangan, dan sawah yang belum diolah secara maksimal untuk kepentingan wisata atau ekonomi produktif. Sebagai contoh, dari enam embung yang ada, hanya satu yang difungsikan sebagai destinasi wisata, sementara sisanya belum digunakan secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan pemahaman dan kapasitas pengelolaan dari para pemangku kepentingan desa terhadap pengelolaan aset secara strategis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan literasi pengelolaan aset agar pemetaan yang telah dilakukan dapat memberikan dampak nyata terhadap pengembangan ekonomi lokal berbasis pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

Ash-Shiddiqy, M., & Ibrahim. (2022). Potensi Desa Dan Strategi Penerapan Ekonomi Islam Dalam Pengelolaan Bisnis Bumdes. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, *22*(1), 1–28. https://doi.org/10.14421/aplikasia.v22i1.2759

Azhari, A., Mustofa, M., Meisari, E. D., & Anggarista, E. T. S. (2023). Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Kualitas Sumber Daya Manusia; BUMDes; Strategi Pengembangan Usaha. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, *14*(2), Article 2. https://doi.org/10.36982/jiegmk.v14i2.3392

Ermawati, Y., & Pujianto, P. (2022). Strategi Pemberdayaan UMKM Berbasis PKK di Desa Wisata Sekapuk Kabupaten Gresik. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *6*(3), 886–912. https://doi.org/10.30651/jms.v6i3.12034

Hadawiya, R., Muda, I., & Batubara, B. M. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, *3*(2), 192–200. https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.749

Huda, R. (2020). Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Sektor Pariwisata di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, *11*(2), 157–170. https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i2.1470

Iskandar, J., Engkus, Sakti, F. T., Azzahra, N., & Nabila, N. (2021). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, *19*(2), Article 2. https://doi.org/10.63309/dialektika.v19i2.1

Pradani, R. F. E. (2020). Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Potensi Lokal Sebagai Penggerak Ekonomi Desa. *Juornal of Economics and Policy Studies*, *1*(1), 23–33. https://doi.org/10.21274/jeps.v1i1.3429

Saragih, N. (2019). Peran Badan Usaha Milik Desa dalam pengelolaan objek wisata di desa Denai Lama kecamatan Pantai Labu kabupaten Deli Serdang. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. http://repository.uinsu.ac.id/6948/

Sarudin, R. (2023). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Kampung Saungkuriang Kota Tangerang. *Jurnal Manajemen Perhotelan Dan Pariwisata*, *6*(1), 220–228. https://doi.org/10.23887/jmpp.v6i1.57709

Scott, J. C. (2010). *Weapons of the Weak: Everyday forms of Peasant Resistance.* Yale University Press. new Heaven And London

Srirejeki, K., Faturahman, A., Warsidi, W., Ulfah, P., & Herwiyanti, E. (2020). Pemetaan Potensi Desa untuk Penguatan Badan Usaha Milik Desa dengan Pendekatan Asset Based Community-Driven Development. *Warta LPM*, *23*(1), 24–34. https://doi.org/10.23917/warta.v23i1.8974

Sumodiningrat, G. (2018). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial.* Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Tambunan, T. T. H. (2021). *UMKM di Indonesia: Perkembangan, Kendala, dan Tantangan.* Prenada Media. Jakarta

Utomo, B. W., & Purnamasari, S. M. (2021). Potret Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Pilar Pengembangan Ekonomi Lokal Desa. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan*, *1*(1), 65–72. http://conference.um.ac.id/index.php/esp/article/view/628

Wahyuningsih, R., & Pradana, G. W. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa Hendrosari Melalui Pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu. *Journal Publika.* *9(*2). 323–334. https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p323-334

Yustika, A. E. (2012). *Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori dan Kebijakan.* Erlangga. Jakarta.